

# BULLETIN EKUITAS



## JURNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS

Perbandingan Sistem Moneter Syariah dengan Konvensional  
Oleh : Amir Machmud

Analisis Preferensi Nasabah Atas Berbagai Jasa Pembiayaan yang  
Ditawarkan BPR Syariah di Kabupaten Bandung  
Oleh : Yudi W. Suwandi dan Dodi Supriyanto

Sistem Manajemen Kinerja Kontekstual  
Oleh : Anton Mulyono Azis

Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Set Kesempatan Investasi  
Terhadap Kebijakan Utang  
Oleh : Fury Khristianty Fitriyah

Aplikasi Metoda Ekonometrika Spatial Dalam Menganalisa Data  
Pendidikan  
Oleh : Judi Al Hilman

Akuntansi Sumberdaya Manusia: Kriteria Pengakuan Sumber  
Daya Manusia Sebagai Aktiva Perusahaan  
Oleh : Memed Sueb

Pengaruh Pelaksanaan Good Corporate Governance Terhadap  
Kinerja Badan Usaha Milik Negara  
Oleh : Hanifah dan Muslim al Kautsar

**PENGARUH PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
(Study pada BUMN yang Berpusat di Kota Madya Bandung)

*Hanifah dan Muslim al Kautsyar*

**Abstrak**

*Dalam sistem perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara memegang peranan sangat penting. Perkembangan BUMN dalam menopang keuangan negara maupun dalam melayani peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional sangat diharapkan. Tetapi fenomena yang terjadi, pengelolaan BUMN di Indonesia dinilai masih belum optimal. Hal ini terlihat pertama, masih kurang optimalnya kinerja BUMN dalam perkembangan ROA, ROE dan laba bersih yang dihasilkan. Kedua, masih rendahnya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam BUMN.*

*Salah satu untuk mengoptimalkan kinerja BUMN yaitu harus dilaksanakannya Good Corporate Governance secara efektif. Dengan demikian tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan Good Corporate Governance terhadap kinerja BUMN. Sehingga diharapkan berguna untuk memberikan suatu solusi khususnya bagi BUMN yang diteliti. Variabel pelaksanaan Good Corporate Governance meliputi transparency, accountability, responsibility, fairness dan Independency, sedangkan kinerja BUMN dibatasi pada ROA, ROE dan NPM.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan good corporate governance baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap kinerja BUMN. Hal ini menunjukkan, untuk meningkatkan kinerja BUMN di Indonesia salah satunya dapat dilakukan dengan melaksanakan good corporate governance secara efektif.*

**Kata Kunci:** GCG, Kinerja Badan Usaha Milik Negara

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Dalam sistem perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara memegang peranan cukup penting. Perkembangan BUMN dalam menopang keuangan negara maupun dalam melayani peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia serta sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional sangat diharapkan. Tetapi fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa pada umumnya pengelolaan BUMN di Indonesia dinilai masih belum optimal diantaranya masih banyaknya BUMN mempunyai kinerja yang rendah dan mengalami kesulitan manajemen (Suyanto; 2007). Fenomena belum optimalnya kinerja BUMN di

Indonesia dapat dilihat *pertama*, kinerja BUMN, selama lima tahun terakhir (2003-2007) dilihat dari ROA dan ROE menunjukkan kinerja yang masih kurang optimal, diantaranya ROA selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 3,67% pertahun sementara target rata-rata pertahun 4,27%.

Dilihat dari ROE sangat jauh dari yang diharapkan, dimana selama lima tahun terakhir (2003-2007) nilai rata-rata ROE sangat berfluktuasi dan tidak pernah mencapai target. Rata-rata ROE selama lima tahun terakhir sebesar 11,35% pertahun sementara yang ditargetkan sebesar 22,15% pertahun. (Tabel 1)

**Tabel 1 Perkembangan ROA dan ROE Pada BUMN Periode (2003 s/d 2007)**

Tahun	R eturn On Asset		R eturn On Equity	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2003	3,82%	2,81%	19,94%	10,32
2004	3,90%	2,49%	20,56%	6,10
2005	4,16%	4,19%	22,03%	15,67
2006	4,47%	4,54%	23,73%	15,75
2007	5,01%	4,30%	24,51	8,90
Rata-rata	4,27	3,67%	22,15	11,35

Sumber : Kinerja BUMN 2007

*Kedua*, dilihat dari perkembangan laba bersih pada BUMN selama lima tahun (2003 s/d 2007), menunjukkan adanya peningkatan yang kurang optimal, dan peningkatan tersebut relatif tidak signifikan atau sangat berfluktuasi. Diantaranya pada tahun 2004 meningkat 73,18% dari tahun sebelumnya, begitu juga tahun 2005 mengalami peningkatan namun lebih rendah atau 11,76% dari tahun sebelumnya dan tahun 2006 mengalami peningkatan kembali tetapi sangat kecil (12,35%). Secara keseluruhan selama lima tahun rata-rata peningkatan hanya sekitar 32,99% (Tabel 2).

**Tabel 2 Perkembangan Laba Bersih Pada BUMN Periode (2003 s/d 2007)**

Tahun	Lab a Bersih	% Kenaikan
2003	24.446.073	-
2004	42.335.232	73,18
2005	47.312.810	11,76
2006	53.157.599	12,35
2007	71.590.513	34,68
Rata-Rata Perkembangan	-	32,99

Sumber : Kinerja BUMN ; 2007 (dalam jutaan)

Seiring dengan relatif kurang optimalnya kinerja BUMN, diiringi pula dengan adanya fenomena kegagalan dalam pengelolaan perusahaan (Badan Usaha Milik Negara), dengan kata lain masih rendahnya *Good Corporate Governance* dalam BUMN. Indikasi rendahnya *Good Corporate Governance* tersebut tercermin dari hasil audit terhadap *Good Corporate Governance* yang dilakukan

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 16 BUMN di Indonesia pada Tahun 2003. Dari 16 BUMN yang diaudit hanya 6 (enam) BUMN yang masuk pada katagori baik sedangkan 10 (sepuluh) BUMN lainnya masuk pada katagori cukup dan tak ada satupun dari BUMN yang masuk pada katagori sangat baik.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan akan lebih kuat di negara berkembang dibanding dengan negara maju. Durnev dan Kim (2002) memberikan bukti bahwa praktik *Good Corporate Governance* lebih bervariasi di negara yang memiliki lingkungan hukum yang lebih lemah. Para ahli yang mendukung bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan diantaranya (Shleiver dan Vishny ; 1997). (Laporta ; 2000). (2003) *Kakabadse dkk* (2001), *Mitton* (2000), *Klapper dan Love* (2002)

Selaku lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi pemegang saham/pemilik modal BUMN mewajibkan BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (I Nyoman Tjager, 2004). Langkah konkrit yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah adalah (i) membangun situs BUMN online guna mendorong implementasi transparansi (ii) melakukan sosialisasi kepada BUMN mengenai prinsip-prinsip dan pentingnya *Good Corporate Governance* bagi peningkatan kinerja usaha (iii) menerbitkan beberapa peraturan yang memuat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Praktik *Good Corporate Governance* ini meliputi *tranparency*, *accountability*, *responsibility* dan *fairness*. Sedangkan kinerja perusahaan dalam hal ini BUMN yaitu merupakan suatu bentuk kesuksesan suatu perusahaan untuk mencapai peran atau target tertentu yang berasal dari aktivitas yang dikerjakannya. Atau tingkat prestasi, keberhasilan yang dapat dicapai oleh suatu organisasi pada suatu periode tertentu (*Brainy Dictionery*; 2004, Proter & Lawler dalam Reza; 2004, Kepmen BUMN Nomor Kep 100/MBU/2002).

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan adanya suatu kesenjangan antara kinerja BUMN dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang ada dengan yang diharapkan. Sedangkan beberapa ahli mengemukakan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, kemudian sejalan dengan visi kementerian BUMN untuk menjadikan BUMN sebagai badan usaha berkarakteristik dunia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang relative besar terhadap pemerintah, sehingga pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BUMN diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang meliputi *tranparency*, *accountability*, *responsibility*, *fairness* dan *Independency* berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Keuangan BUMN yang berpusat di Kota Madya Bandung
2. Apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang meliputi *tranparency*,

*accountability, responsibility, fairness* dan *Independency* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Keuangan BUMN yang berpusat di Kota Madya Bandung

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang meliputi *tranparency, accountability, responsibility, fairness* dan *Independency* berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Keuangan BUMN yang berpusat di Kota Madya Bandung
2. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* yang meliputi *tranparency, accountability, responsibility, fairness* dan *Independency* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Keuangan BUMN yang berpusat di Kota Madya Bandung

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 *Good Corporate Governance.*

Istilah *Good Corporate Governance* dewasa ini sangat populer, namun saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Dibawah ini berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, maka ditetapkan bahwa:

“*Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika, sedangkan *stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.

Prinsip-prinsip dasar merupakan pegangan dalam penjabaran tindakan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*. Beberapa institusi mencoba memberikan pedoman dasar yang seringkali disebut sebagai prinsip-prinsip menerapkan praktik-praktik *Good Corporate Governance*, diantaranya oleh *Organization For Economic Cooperation and Development / OECD* (2004), mengedepankan empat unsur penting *Good Corporate Governance* yakni *Transparency, Accountability, Fairness, Responsibility*.

Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 dan *National Committee Governance* (NCG;2006). menyebutkan lima prinsip *Good Corporate Governance* yaitu:

- (1) *Transparansi (Transparency)*, yaitu merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengembangkan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- (2) *Akuntabilitas (Accountability)*, yaitu kejelasan adanya fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- (3) *Kewajaran (Fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan penggajian dan peraturan perundang-undangan.
- (4) *Pertanggungjawaban (Responsibility)* yaitu merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip koorporasi yang sehat.
- (5) *Independen (Independency)* yaitu suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan. Dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

## 2.2 Kinerja Perusahaan

Manajemen perusahaan seharusnya berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan dapat dilihat dari tingkat kinerja perusahaan. Purwadarmita (2007) mengemukakan bahwa kinerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha.

Kinerja menurut Mulyadi (2002) adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi.

*Keats dan Hits* dalam Zulaikha (2001) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan sebuah konsep yang sulit, baik definisi maupun dalam pengukurannya, karena sebagai sebuah konstruksi, kinerja bersifat multidimensional dan oleh karena itu pengukuran dengan menggunakan dimensi pengukuran tunggal tidak mampu memberikan pemahaman yang komprehensif. Oleh karenanya pengukuran kinerja hendaknya menggunakan atau mengintegrasikan dimensi pengukuran yang beragam (*multiple measures*). Parameter yang sering digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan adalah dengan menggunakan pendekatan keuangan dimana informasinya diambil dari laporan keuangan atau sumber laporan keuangan lainnya. (Venti ; 2007).

Sebagai tindak lanjut pemerintah untuk melaksanakan reformasi terhadap BUMN, pemerintah dalam hal ini Menteri Negara-BUMN, telah mengeluarkan

Kepmen BUMN Nomor Kep 100/MBU/2002 Tanggal 4 Juni Tahun 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN, yang meliputi

- 1) *Return of Equity (ROE)*, Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola kapital yang tersedia untuk mendapatkan net income.
- 2) *Return to Total Assets (ROA)*, Merupakan kemampuan manajemen dalam menghasilkan income dari pengelolaan asset yang dimilikinya
- 3) *Current Ratio*, Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih, dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana
- 4) *Net Profit Margin*, Merupakan perbandingan pendapatan dengan jumlah penjualan bersih, juga merupakan ukuran kinerja operasional yang mengindikasikan kinerja perusahaan dalam jangka pendek (selama setahun).
- 5) *Operational Profit Margin* yaitu laba sebelum dikurangi pajak dan biaya lain-lain dibandingkan dengan jumlah pendapatan penjualan bersih juga merupakan ukuran kinerja operasional yang mengindikasikan kinerja perusahaan dalam jangka pendek (selama setahun).
- 6) *Debt to Equity* yaitu perbandingan antara total hutang dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan para periode tertentu.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode yang Digunakan

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang meliputi *transparency, accountability, responsibility* dan *fairness* serta kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Madya Bandung periode 2007. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Analisis verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistika yaitu path analysis.

#### 3.2 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu pelaksanaan *Good Corporate Governance* (X) dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan BUMN (Y). Adapun operasionalisasi variabel penelitian selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<i>Good Corporate Governance</i> (X)	<i>Transparency</i> (X1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang disampaikan lengkap dan akurat (1)</li> <li>• Informasi yang disampaikan tepat waktu (2)</li> <li>• Memberikan informasi yang sama kepada semua pemangku kepentingan.(3)</li> </ul>	Ordinal

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerbitkan laporan keuangan beserta hasil analisis manajemen di internet (4)</li> </ul>	
	<i>Accountability</i> (X.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pedoman corporate governance tertulis dan rinci mengenai fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan ( 5 )</li> <li>Sistem evaluasi dan monitoring (6)</li> <li>Sistem <i>reward and punishment</i> (7)</li> </ul>	Ordinal
	<i>Fairness</i> (X.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>hak stakeholder dilindungi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (8)</li> <li>Hak mendapat informasi yang relevan bagi stakeholder (9),</li> <li>Saluran bagi stakeholder untuk memberikan pendapatnya (10)</li> <li>Pemegang saham memiliki kedudukan yang setara dalam perusahaan (11)</li> </ul>	Ordinal
	<i>Responsibility</i> (X.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketaatan manajemen terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (12)</li> <li>Pertanggungjawaban manajemen terhadap Corporate Social Responsibility (13)</li> <li>Pertanggungjawaban manajemen terhadap keadilan bagi semua pemangku kepentingan (14)</li> <li>Memberikan laporan keuangan dan non keuangan kepada pihak yang berwenang (15)</li> <li>Perwujudan aktualisasi diri (16)</li> </ul>	Ordinal
	<i>Independency</i> (X.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya standar profesional sebagai landasan personil di perusahaan (17)</li> <li>Tidak adanya tekanan atau benturan kepentingan pihak manapun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan prinsip koorporasi (18)</li> </ul>	Ordinal
Kinerja keuangan BUMN (Y)	<i>Return On Assets (ROA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Net Income</i></li> <li><i>Total Asset</i></li> </ul>	Rasio
	<i>Return On Equity Capital(ROE)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Net income</li> <li>Equity Capital</li> </ul>	Rasio
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Net Profit Margin</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Net income</li> <li>Pendapatan</li> </ul>	Rasio

### 3.3 Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan kuesioner, dokumentasi dan observasi, sehingga dengan mengacu pada konsep tersebut, sumber data adalah responden dan dokumen-dokumen serta catatan-catatan. Dengan demikian sumber data penelitian yang dipergunakan sebagai bahan kajian dan analisis bersumber dari :

(1) Sekretaris *Good Corporate Governance* sebagai sumber informasi tentang

- pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang meliputi *transparency*, *accountability*, *responsibility* dan *fairness*
- (2) Buku Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara periode 2007 sebagai sumber informasi Kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (data sekunder).
  - (3) Internet dan sumber-sumber lain yang dapat mendukung pada penelitian yang akan dilakukan.

### 3.4 Populasi Penelitian

Populasi adalah Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Madya Bandung periode 2007. Adapun karakteristik pengambilan populasi sasaran penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) BUMN terdaftar pada Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara Periode 2007 yang berpusat di Kota Madya Bandung
- 2) BUMN menerbitkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2007 dan telah diaudit oleh akuntan publik
- 3) Terdapat penjualan pada tahun buku yang bersangkutan atau penjualan perusahaan tidak sama dengan nol.

Pemenuhan kriteria tersebut, maka populasi sasaran terdapat 8 BUMN yaitu PT. Pos Indonesia, PT. LEN Industri, PT. Perkebunan Nusantara VIII, PT. Bio Farma, PT. KAI, PT. PINDAD, PT. TELKOM, dan PT.Inti

### 3.5 Model Penelitian

Model penelitian analisis deskriptif dan verifikatif, dengan menggunakan kombinasi kedua jenis analisis tersebut akan diperoleh generalisasi yang bersifat komprehensif. Pada penelitian ini analisis verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh pelaksanaan *good corporate governance* yang meliputi *transparency* (X1), *accountability* (X2), *responsibility* (X3) dan *fairness* (X4) terhadap kinerja keuangan BUMN (Y).

## IV HASIL PENELITIAN

### 4.1 Hasil Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk melihat valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total butir pernyataan lainnya, apabila koefisien korelasinya lebih besar atau sama dengan 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan korelasi *product momet* ( $r$ ).

Berdasarkan Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item kuesioner *Good Corporate Governance* memiliki koefisien validitas lebih besar dari  $r$  kritis sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut valid, artinya item-item

yang digunakan untuk mengukur *Good Corporate Governance* mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian

### 1. Analisis Deskriptif *Good corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara

Agar lebih mudah dalam menganalisa jawaban responden maka pada analisis deskriptif akan dilakukan kategorisasi terhadap persentase rata-rata skor tanggapan responden. Penentuan kategori skor tanggapan responden didasarkan pada rentang skor minimum dengan skor maksimum, dimana rentang skor minimum dengan skor maksimum akan dibagi menjadi 5 kategori sesuai dengan jumlah kategori pada instrumen penelitian.

**Tabel 4 Kriteria Penilaian Rata-Rata Skor Tanggapan Responden**

No.	Rata-Rata skor	Kriteria
1	1,00 – 1,80	Tidak baik/Sangat rendah
2	1,81 – 2,60	Kurang baik/Rendah
3	2,61 – 3,40	Cukup baik/Cukup tinggi
4	3,41 – 4,20	baik/Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat baik/Sangat tinggi

Sumber : Hasil Dari lapangan (diolah)

### 2. Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Mengenai *Good Corporate Governance*

Dimensi *pertama* pada *good corporate governance* adalah *transparency*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. *Transparency* terdiri dari beberapa indikator. Jawaban responden tentang indikator tersebut dapat dijelaskan oleh Tabel 5

**Tabel 5 Kategorisasi Skor Tanggapan Responden Mengenai *Transparency***

No	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
1	Informasi yang disampaikan lengkap dan akurat	3,75	Lengkap dan akurat
2	Informasi yang disampaikan tepat waktu	3,00	Cukup tepat waktu
3	Memberikan informasi yang sama kepada semua pemangku kepentingan	3,63	Sering
4	Menerbitkan laporan keuangan beserta hasil analisis manajemen di internet	3,38	Cukup sering
	<b>Rata-Rata Total</b>	<b>3,44</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : Hasil Dari lapangan (diolah)

Walaupun sudah lengkap dan akurat dalam penyampaian laporan keuangan, namun dilihat dari tingkat ketepatan waktu dalam memberikan

informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dapat dikatakan cukup (skore 3), begitu juga perusahaan menerbitkan laporan keuangan beserta hasil analisis manajemen di internet masuk pada katagori cukup atau relatif belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa informasi yang disampaikan tidak selalu tepat waktu, misalnya pada saat dibutuhkan memang ada, tidak jauh hari informasi tersebut sudah diterima. Informasi lewat internet tidak selalu langsung di informasikan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi lengkap.

Dilihat secara keseluruhan transparency masuk pada katagori tinggi (skor 3,44), data ini mengandung makna bahwa pada BUMN yang diteliti tingkat keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan sudah tinggi, walaupun ada beberapa yang belum optimal.

Dimensi kedua, *Accountability* yaitu adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Jawaban responden pada indikator *Accountability* sebagai berikut (Tabel 6) :

**Tabel 6 Kategorisasi Skor Tanggapan Responden Mengenai *Accountability***

No	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
1	Adanya pedoman corporate governance tertulis dan rinci	3,63	Tersedia
2	Sistem evaluasi dan monitoring	3,38	Cukup baik
3	Sistem <i>reward and punishment</i>	3,50	Baik
	<b>Rata-Rata Total</b>	<b>3,50</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : Hasil Dari lapangan (diolah)

Berdasarkan table diatas (Tabel 6), menunjukkan bahwa pada BUMN yang diteliti telah adanya kejelasan telah tersedia tentang fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan, dimana pedoman corporate governance telah tertulis dan rinci, sehingga mendorong terlaksananya pengelolaan perusahaan secara efektif dan akuntabel (skore 3,63).

Sistem *reward and punishment*, merupakan salah satu indikator dalam menciptakan akuntabilitas dalam perusahaan. Berdasarkan penelitian di lapangan sistem *reward and punishment* dalam BUMN masuk dalam katagori baik (3,5). Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem *reward and punishment* dengan baik untuk mengakomodasikan rasa keadilan bagi setiap karyawan bila menghasilkan kinerja baik atau buruk

Walaupun pedoman *Corporate Governance* telah tertulis dan rinci, serta pelaksanaan sistem *reward and punishment* telah dilaksanakan, namun sistem evaluasi dan monitoring tidak optimal dilakukan atau masuk pada katagori cukup. Kondisi ini mengandung makna bahwa evaluasi dan monitoring yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan tugas telah

dilaksanakan secara akuntabel, antara lain pelaksanaan corporate governance yang telah ditentukan, serta pelaksanaan sistem *reward and punishment* yang telah dilaksanakan, namun tidak selalu diikuti dengan adanya pengawasan yang sangat ketat. Dengan demikian setidaknya akan mengakibatkan tingkat keyakinan bahwa tugas yang dilaksnaakan cukup akuntabel atau kurang optimal.

Dilihat secara keseluruhan Accountability, masuk pada katagori tinggi (skore 3,5) artinya, pada BUMN yang diteliti dalam kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sudah tinggi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Dimensi *ke tiga*, *fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak stakeholder dilindungi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jawaban responden mengenai indikator *fairness* pada BUMN yang diteliti dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7 Kategorisasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Fairness**

No	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
1	Hak stakeholder dilindungi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	3,25	Cukup terlindungi
2	Hak mendapat informasi yang relevan bagi stakeholder	3,63	Tinggi
3	Saluran bagi stakeholder untuk memberikan pendapatnya	3,88	Tersedia
4	Pemegang saham memiliki kedudukan yang setara dalam perusahaan	4,13	Setara
	Rata-Rata Total	3,72	Tinggi

Sumber : Hasil Dari lapangan (diolah)

Kondisi ini menggambarkan bahwa informasi yang diterima oleh para stakeholder tersebut diterima seluas-luasnya, serinci-rincinya, dalam artian semua informasi perusahaan yang relevan. Selain itu seluruh *stakeholder* diberikan hak untuk menyalurkan pendapatnya, dalam artian hak memberikan komentar ketidakadilan, hak-memberikan komentar tentang perusahaan yang ditempatinya dan hak untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan baik minoritas maupun mayoritas.

Kemudian setiap pemegang saham telah diberlakukan memiliki kedudukan yang sama, berdasarkan azas bahwa setiap pemegang saham mempunyai kedudukan yang setara dalam perusahaan. Indikator ini merupakan hal yang sangat penting, yakni kesetaraan kedudukan antara pemegang-saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Tatakelola perusahaan yang baik akan dinyatakan fair jika pada perusahaan tersebut terdapat kesetaraan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Dalam *fairness*, memang terlihat bahwa hak mendapat informasi yang relevan bagi stakeholder sudah tinggi, saluran bagi stakeholder untuk memberikan pendapatnya sudah tersedia dan pemegang saham telah memiliki kedudukan yang setara dalam perusahaan. Namun, masih ada juga perlakuan yang kurang optimal yaitu dalam hal perlindungan terhadap para stakeholder. Kondisi ini terlihat bahwa para stakeholder hak-haknya telah cukup dilindungi berdasarkan prosedur yang benar yang ditetapkan oleh perseroan, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berarti tidak optimal dilindungi, tetapi secukupnya.

Dimensi *keempat*, *Responsibility* yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Jawaban responden mengenai indikator *Responsibility* dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 8).

**Tabel 8 Kategorisasi Skor Tanggapan Responden Mengenai *Responsibility***

No	Indikator	Rata-Rata Skor	Kriteria
1	Ketaatan manajemen terhadap hukum dan peraturan yang berlaku	3,38	Cukup Tinggi
2	Pertanggungjawaban manajemen terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i>	3,63	Tinggi
3	Pertanggungjawaban manajemen terhadap keadilan bagi semua pemangku kepentingan	4,00	Tinggi
4	Direksi dan Komisaris melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawabnya	4,13	Seringkali
5	Perwujudan aktualisasi diri	3,88	Tinggi
	<b>Rata-Rata Total</b>	<b>3,80</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : Hasil Dari lapangan (diolah)

Dari Indikator *responsibility* tersebut terlihat bahwa perusahaan telah melaksanakan tugas dan mempunyai pertanggungjawaban manajemen yang tinggi dalam hal melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sebagai peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Kemudian pertanggungjawaban manajemen terhadap keadilan bagi semua pemangku kepentingan sudah tinggi, begitu juga para direksi dan Komisaris melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab yang diembannya dengan sepenuh hati dan motivasi yang sangat tinggi. Perwujudan aktualisasi diri pada perusahaan tersebut sudah cukup tinggi. Namun diilain pihak ketaatan manajemen terhadap hukum dan peraturan yang berlaku masuk pada katagori cukup (skore 3,38), hal ini mengindikasikan bahwa hukum dan peraturan memang sudah cukup dilaksanakan, tetapi tidak optimal.

Dimensi yang *kelima*, *Independency* yaitu suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan. Dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun

yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Lebih jelasnya tanggapan responden sebagai hasil penelitian di lapangan mengenai independency dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 9).

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa para pengelola di perusahaan yang diteliti, umumnya dalam hal mengambil suatu keputusan sudah bersifat profesional terbebas dari adanya tekanan atau benturan kepentingan pihak manapun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan prinsip korporasi. Walaupun masih ada tekanan dengan terbenturnya adanya birokrasi, namun dalam pengambil keputusan para negeloa perusahaan dapat dikatakan semaksimal mungkin melakukan yang terbaik

**Tabel 9 Kategorisasi Skor Tanggapan Responden Mengenai *Independency***

No	Indikator	Rata-Rata	Kriteria
1	Adanya standar profesional sebagai landasan personil di perusahaan	4,25	Sangat Tersedia
2	Tekanan atau benturan kepentingan pihak manapun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan prinsip korporasi	3,75	Jarang terjadi
	<b>Rata-Rata Total</b>	<b>4,00</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : Hasil Dari lapangan (diolah)

### 3. Analisis Deskriptif Kinerja Keuangan BUMN yang meliputi ROA, ROE dan NPM Pada Periode 2007

Kinerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha (Purwadarmita: 2007), sedangkan menurut Mulyadi (2002) yaitu penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Kinerja BUMN dilihat dari Return On Asset pada BUMN yang diteliti periode 2007, sangat bervariasi, dimana ROA terkecil diperoleh PT.POS INDONESIA sebesar 0,78 dan PT.KAI sebesar 0,48. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam menghasilkan income dari pengelolaan asset yang dimilikinya relative sangat kecil bahkan dibawah rata-rata BUMN yang diteliti yaitu 6,08. Dapat diartikan bahwa asset yang dimiliki oleh PT.Pos Indonesia dan PT.KAI serta LEN jauh lebih besar dibanding dengan pendapat yang diterimanya. Kemungkinan besar terlalu banyak berinvestasi sementara barang atau produk yang dipasarkannya kurang memenuhi permintaan pasar. Bahkan sebagian barang atau produk yang dulunya menjadi dominan sekarang sudah jauh ketinggalan misalnya surat, peranko. Begitu juga dalam rasio ROE dan Net profit Margin.

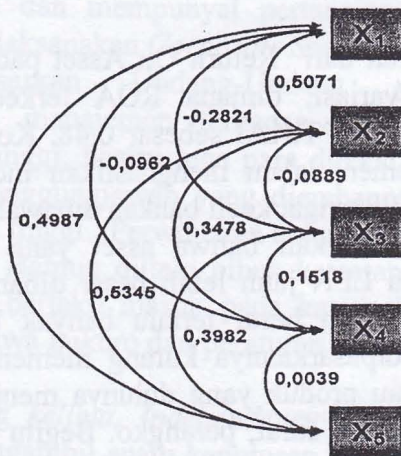
#### 4. Pengaruh Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja keuangan BUMN

Sebelum melangkah ke analisis jalur, terlebih dahulu di analisis hubungan antara sesama sub variabel independen yaitu dimensi *transparency* ( $X_1$ ), dimensi *accountability* ( $X_2$ ), dimensi *fairness* ( $X_3$ ), dimensi *responsibility* ( $X_4$ ), dimensi *independency* ( $X_5$ ).

Tabel 10 Matriks Korelasi Antar Sub Variabel Independen

	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$X_5$
$X_1$	1,0000				
$X_2$	0,5071	1,0000			
$X_3$	-0,2821	-0,0889	1,0000		
$X_4$	-0,0962	0,3478	0,1518	1,0000	
$X_5$	0,4987	0,5345	0,3982	0,0039	1,0000

Berdasarkan nilai koefisien korelasi seperti diuraikan pada tabel diatas dapat dilihat hubungan yang paling kuat diantara kelima dimensi *Good Corporate Governance* adalah antara dimensi *accountability* ( $X_2$ ) dengan dimensi *independency* ( $X_5$ ), kemudian hubungan antara dimensi *transparency* ( $X_1$ ) dengan dimensi *accountability* ( $X_2$ ). Sebaliknya hubungan yang paling lemah yang ditemukan diantara dimensi *Good Corporate Governance* adalah antara dimensi *responsibility* ( $X_4$ ) dengan dimensi *independency* ( $X_5$ ), kemudian hubungan antara dimensi *transparency* ( $X_1$ ) dengan dimensi *responsibility* ( $X_4$ ).



Gambar 2 Diagram Hubungan Antar Variabel bebas

Setelah dianalisis hubungan diantara sesama dimensi *Good Corporate Governance*, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur. Berdasarkan paradigma penelitian maka secara matematis hubungan struktural antara kelima dimensi *Good Corporate Governance* dengan kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Madya Bandung dirumuskan sebagai berikut.

$$Y_i = \rho_{YX1}X_1 + \rho_{YX2}X_2 + \rho_{YX3}X_3 + \rho_{YX4}X_4 + \rho_{YX5}X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y_i$  = Kinerja keuangan (ROA, ROE dan NPM)

$X_1$  = Dimensi *transparency*

$X_2$  = Dimensi *accountability*

$X_3$  = Dimensi *fairness*

$X_4$  = Dimensi *responsibility*

$X_5$  = Dimensi *independency*

$\rho_{YXi}$  = Koefisien jalur

$\varepsilon$  = epsilon (pengaruh faktor lain)

Pada persamaan struktur diatas terlihat dengan jelas bahwa kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Madya Bandung yang diberi simbol Y merupakan akibat dari perubahan kelima dimensi *Good Corporate Governance* yang diberi simbol  $X_1$  sampai dengan  $X_5$ . Berikut disajikan analisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap aspek-aspek kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Madya Bandung.

### 5. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Return on Asset*

Dari hasil pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS 15 diperoleh koefisien jalur dari masing-masing dimensi *Good Corporate Governance* terhadap *return on asset* Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Madya Bandung seperti dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 11 Koefisien Jalur Masing-Masing Dimensi *Good corporate governance* Terhadap *Return on Asset***

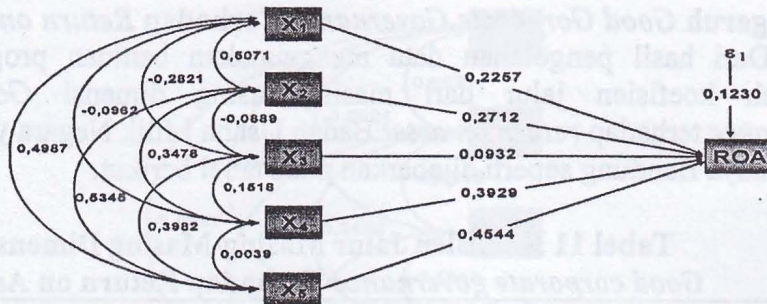
Dimensi	Koefisien Jalur	$R^2 = 0,8770$
$X_1$	0,2257	
$X_2$	0,2712	
$X_3$	0,0932	
$X_4$	0,3929	
$X_5$	0,4544	

Melalui nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) diketahui bahwa secara bersama-sama kelima dimensi *Good Corporate Governance* (*transparency, accountability, fairness* dan *responsibility*) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 87,70% terhadap *return on asset* . Sementara sisanya sebesar 12,30% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kelima dimensi *Good Corporate Governance*.

**Tabel 12 Besar Pengaruh Masing-Masing Dimensi *Good Corporate Governance* Terhadap *Return On Asset***

Sub-Variabel	Besar Pengaruh		Total Pengaruh
	Langsung	Tidak langsung	
<i>Transparency</i>	5,09%	6,77%	11,86%
<i>Accountability</i>	7,35%	13,17%	20,52%
<i>Fairness</i>	0,87%	1,42%	2,29%
<i>Responsibility</i>	15,44%	3,48%	18,92%
<i>Independency</i>	20,65%	13,46%	34,11%
<b>Pengaruh Simultan =</b>			<b>87,70%</b>

Data pada tabel 12 menunjukkan bahwa dimensi *independency* pada *Good Corporate Governance* memberikan pengaruh yang paling besar terhadap *return on asset* . Sebaliknya dimensi *fairness* memberikan pengaruh yang paling lemah terhadap *return on asset* . Hal ini dapat diartikan bahwa suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, besar pengaruhnya terhadap ROA dibanding dengan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak –hak stakeholders yang timbul berdasarkan penggajian dan peraturan perundang-undangan.



**Gambar 3 Diagram Jalur *Good corporate governance* Terhadap *Return On Asset***

**6. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Return on Equity***

Dari hasil pengolahan data diperoleh koefisien jalur dari masing-masing dimensi *Good Corporate Governance* terhadap *return on equity* Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Madya Bandung seperti dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 13 Koefisien Jalur Masing-Masing Dimensi  
Good corporate governance Terhadap Return on Equity**

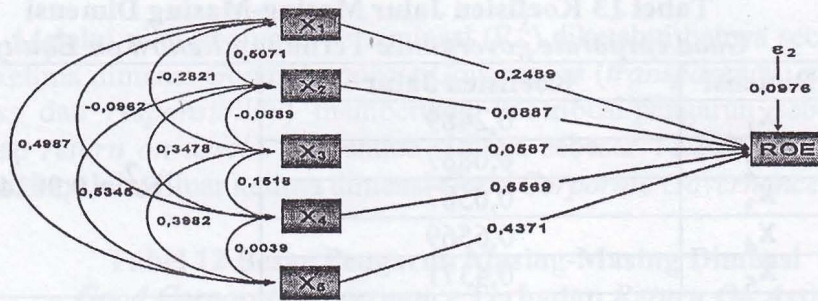
Dimensi	Koefisien Jalur	$R^2 = 0,9024$
X <sub>1</sub>	0,2489	
X <sub>2</sub>	0,0887	
X <sub>3</sub>	0,0587	
X <sub>4</sub>	0,6569	
X <sub>5</sub>	0,4371	

Melalui nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) diketahui bahwa secara bersama-sama kelima dimensi *Good Corporate Governance* (*transparency, accountability, fairness* dan *responsibility*) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 90,24% terhadap *return on equity* Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Madya Bandung. Sementara sisanya sebesar 9,76% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kelima dimensi *Good Corporate Governance*.

**Tabel 14 Besar Pengaruh Masing-Masing Dimensi  
Good corporate governance Terhadap Return On Equity**

Sub-Variabel	Besar Pengaruh		Total Pengaruh
	Langsung	Tidak langsung	
<i>Transparency</i>	6,19%	4,56%	10,75%
<i>Accountability</i>	0,79%	5,17%	5,96%
<i>Fairness</i>	0,34%	1,15%	1,49%
<i>Responsibility</i>	43,16%	1,15%	44,31%
<i>Independency</i>	19,10%	8,63%	27,73%
<b>Pengaruh Simultan =</b>			<b>90,24%</b>

Data pada tabel 14 menunjukkan bahwa dimensi *responsibility* pada *Good Corporate Governance* memberikan pengaruh yang paling besar terhadap *return on equity*. Sebaliknya dimensi *fairness* memberikan pengaruh yang paling lemah terhadap *return on equity*. Hasil ini menunjukkan bahwa kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat lebih besar pengaruhnya terhadap ROE dibanding dengan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan penggajian dan peraturan perundang-undangan.



Gambar 4 Diagram Jalur *Good corporate governance* Terhadap *Return On Equity*

7. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Net Profit Margin*

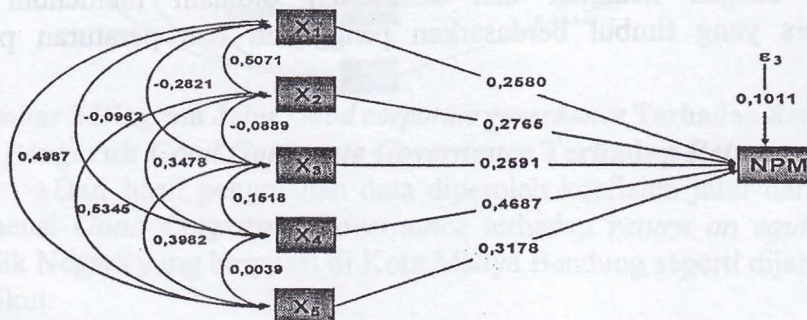
Dari hasil pengolahan data , diperoleh koefisien jalur dari masing-masing dimensi *Good Corporate Governance* terhadap *net profit margin* Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Madya Bandung seperti dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 15 Koefisien Jalur Masing-Masing Dimensi *Good corporate governance* Terhadap *Net profit margin*

Dimensi	Koefisien Jalur	$R^2 = 0,8989$
X <sub>1</sub>	0,2580	
X <sub>2</sub>	0,2765	
X <sub>3</sub>	0,2591	
X <sub>4</sub>	0,4687	
X <sub>5</sub>	0,3178	

Melalui nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) diketahui bahwa secara bersama-sama kelima dimensi *Good Corporate Governance* (*transparency, accountability, fairness* dan *responsibility*) memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 89,89% terhadap *net profit margin* Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Madya Bandung. Sementara sisanya sebesar 10,11% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kelima dimensi *Good Corporate Governance*.

Gambar 4 Diagram Jalur *Good corporate governance* Terhadap *Net profit margin*



Data pada tabel 18 menunjukkan bahwa dimensi *responsibility* pada *Good Corporate Governance* memberikan pengaruh yang paling besar terhadap *net profit margin*. Sebaliknya dimensi *fairness* memberikan pengaruh yang paling lemah terhadap *net profit margin*. Hasil ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dipastikannya dipatuhinya peraturan – peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial ternyata pengaruhnya terhadap Net Profit margin lebih besar dibanding dengan perlakuan perlindungan dan jaminan bagi para pemegang saham.

**Tabel 16 Besar Pengaruh Masing-Masing Dimensi  
*Good corporate governance* Terhadap *Net profit margin***

Sub-Variabel	Besar Pengaruh		Total Pengaruh
	Langsung	Tidak langsung	
<i>Transparency</i>	6,65%	4,66%	11,31%
<i>Accountability</i>	7,65%	12,18%	19,83%
<i>Fairness</i>	6,71%	2,60%	9,31%
<i>Responsibility</i>	21,97%	5,25%	27,22%
<i>Independency</i>	10,10%	12,12%	22,22%
<b>Pengaruh Simultan =</b>			<b>89,89%</b>

#### IV. KESIMPULAN

Terdapat hubungan antara kelima dimensi *Good Corporate Governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *fairness*, *responsibility* dan *independency*. Hal ini mengandung makna bahwa jika dalam perusahaan tersebut terdapat kejelasan fungsi pelaksanaan, pengambilan keputusan yang independen, profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan terdapat keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*, maka pertanggungjawaban akan dilaksanakan dengan baik, begitu juga informasi yang disampaikan akan transparan.

- *Good Corporate Governance* yang meliputi *transparency*, *accountability*, *fairness*, *responsibility* dan *independency* secara simultan berpengaruh terhadap *Return on Asset*, *Return On Equity* dan *Net Profit Margin* baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan apabila *Good Corporate Governance* yang meliputi *transparency*, *accountability*, *fairness*, *responsibility* dan *independency* secara bersama-sama dilaksanakan dengan baik, maka dapat diiringi pula dengan meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari asset yang dimilikinya (*Return On Asset*) dan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari modal yang dimilikinya (*Return On Equity*) serta kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dibandingkan dengan tingkat penjualan yang didapatnya (*Net Profit Margin*).
- *Good Corporate Governance* yang meliputi *transparency*, *accountability*, *fairness*, *responsibility* dan *independency* berpengaruh secara parsial baik

langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja keuangan BUMN yang meliputi ROA, ROE dan NPM dengan uraian sbb :

- a. Adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan maka akan meningkatkan ROA, ROE dan Net Profit margin.
- b. Adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ maka akan meningkatkan ROA, ROE dan Net Profit margin.
- c. Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dalam perusahaan maka akan meningkatkan ROA, ROE dan Net Profit margin.
- d. Adanya keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan meningkatkan ROA, ROE dan Net Profit margin.
- e. Tingkat independency yang tinggi yaitu suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik maka dapat meningkatkan ROA, ROE dan Net Profit margin.

## SARAN

1. Salah satu untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMN yaitu harus adanya kerjasama dari pihak manajemen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, dengan demikian disarankan bagi BUMN yang masih lemah kinerja keuangannya diharapkan dapat bekerjasama untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* secara optimal.
2. Untuk meningkatkan kinerja keuangan pada BUMN yang diteliti disarankan dalam hal transparency untuk selalu mengoptimalkan Informasi yang disampaikan tepat waktu dan dalam menerbitkan laporan keuangan jauh-jauh hari sehingga memberikan peluang yang cukup banyak untuk dianalisa dan lengkap. Dalam Accountability, sistem evaluasi dan monitoring supaya lebih ditingkatkan lagi. Dalam hal fairness, perlindungan terhadap hak para stakeholder sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih dioptimalkan. Dalam Responsibility, Ketaatan manajemen terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dioptimalkan dan dalam independency yaitu adanya standar profesional sebagai landasan personal di perusahaan serta tekanan atau benturan kepentingan pihak manapun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan prinsip korporasi tetap dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Effendi, 2009, *Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Salemba Empat
- Brailsford, Oliver, and Pua , 2002, *On The Relation Between Ownerrship Structure and Capital Structure*, Journal of Accounting and Finance No. 42
- Chen Y.2001,*Essays on Voting Power, Corporate Governance and Capital Structure*, Disseration, Goteberg, Swedia, Departement of Economic, Scholl of Economics and Commercial aw,Goteberg university
- Cooper, Donald R dan Pamela S Schindler, *Business Research Methods 7 Th* Editions, Mc Graw International Edition, Boston, 2002
- Chen,J. 2001, *Ownership Structure as Corporate Governance Mechanisme : Evidence From Chinese Listed Companies* , Economic Of Planing 34,pg 53-72
- Daniri,M.A. (2005), *Good Corporate Governance , Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta : Gloria Printing
- Fama,E.F. Jensen , Michael C. (1983), *Agency Problems and Residual Claims*, The Journal , of Law and Economic,26 (2)
- I Nyoman Tjager, F. Antonius Alijoyo. Humphrey R.Djemat, & Bambang Soembodo, 2003. *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi komunitas Bisnis Indonesia*. PT. Prenhallindo.Jakarta.
- Kin, Lam Chee,2006, *Corporate Governanve Workshop on Banking Corporate Governance*.
- Klapper L.F. and Love, 2002, *Corporate Governance, Investor Protection and Performane in Emerging market*, Working Paper No.2818, Bank policy Research
- Laporan Kinerja BUMN, 2003 – 2007, Kementrian Badan Usaha Milik Negara
- Nurdin, Aminudin 2003, *Corporate Governance PT. Astra National Breakthrough in Corporate Governance, Strategy Management an Performance management*,GML Performance Consulting
- National Committtee on Governance,2006 *Indonesian Code Of Good Corporate Governance*. <http://www.governance Indonesia or.id>
- OECD, 2004, *Corporate Governance-Improving Competitivines And Access to Capital in Global Market*.
- Organisasi profesi Internal Auditor,2003,*Position Paper I/2003,Rekomendasi Mengenai peran Internal Audit Dalam Meningkatkan Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia*
- Pinteris, G. 2002 *Agency Cost, Ownership Structure and Performance in Argentina Banking* , Working Paper University of Illions
- Prasetyantoko, 2008” *Corporate Governance Pendekatan Institusional*” PenerbitGramedia Jakarta

- Ridwan, 2008”*Cara Menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis)*, Penerbit Alfabeta
- Suharsini Arikunto, 2007, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi , Rineka Cipta Jakarta
- Sekaran Uma,2000, *Research Methods For Business*, John Wiley & Sons,Inc New York, 1996
- Sathe, V 1985, *Culture and Related Corporate Realities*, Homewood, III : Richard D. Irwin.
- Suyanto , 2007, *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Atas kinerja BUMN di Indonesia*. Jurnal. Akuntabilitas, Maret 2007.
- Sawyer , Lawrence B, Mortimer A Dittenhofer, & James H. Scheiner.2003 *Sawyer’s Internal Auditing-The Practise of Modern Internal Auditing Editing*. Maitland Avenue.Altamonte Springs, Florida.The Institute of Internal Auditors
- Wilson Arapat, 2008, *How To Implementasi Good Corporate Governance Efecctively”*, Skyrocketing Publisher



**Utama**  
UNIVERSITAS WIDYATAMA